LAPORAN KINERJA (LAKIN) KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG TAHUN 2024



KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG

Jalan Kolonel Ahmad Syam No. 69A, Jatinangor, Sumedang Telp. (022) 87778999 Fax. (022) 87833111

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Tahun 2024 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada KPP Pratama Sumedang. Penyusunan LAKIN ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

LAKIN ini berperan pula sebagai alat kendali, alat penilai kinerja kualitatif dan kuantitatif, serta sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka tercapai *Good Governance*.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan dari KPP Pratama Sumedang.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Adriana Hermawati Koorag



DAFTAR ISI

Kata P	Pengantar	2
Daftar	lsi	3
Ikhtisa	r Eksekutif	4
Bab I F	Pendahuluan	
A.	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
В.	Peran Strategis Instansi	6
C.	Sistematika Pelaporan	7
Bab II	Rencana Strategis dan Rencana Kinerja	
A.	Rencana Strategis	8
В.	Perjanjian Kinerja	10
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
A.	Capaian Kinerja Organisasi	12
В.	Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
Bab IV	⁷ Realisasi Anggaran	36
Bab IV	Penutup	37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan melembaga sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan untuk pencapaian kinerja instansi yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.

Tujuan utama dari kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang tahun 2024 pada khususnya adalah mendukung tercapainya target penerimaan pajak dengan tetap menjaga citra perpajakan yang bersih dan berwibawa. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu setahun itu adalah mengupayakan tercapainya target penerimaan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan, dan hasil akhir dari penerimaan pajak KPP Pratama Sumedang tahun 2024 adalah 101,14% dari target penerimaan 2024 (berdasarkan data Apportal).

Tentu saja kendala-kendala yang dihadapi selama satu tahun berjalan sangat beragam, namun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang telah memberikan usaha yang maksimal sehingga bisa tercapai 101,14% penerimaan dari target dengan terus menyadarkan masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak berdasarkan skala prioritas yang mempunyai deterent effect luas terhadap masyarakat.

Untuk tahun mendatang, usaha ini perlu dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi dalam hal perbaikan segala kekurangan yang dialami di tahun 2024 agar tidak terulang kembali serta dapat meningkatkan kualitas layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang ini.

BABI

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;

- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- I. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi di KPP Pratama Sumedang terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- f. Seksi Pengawasan I;
- g. .Seksi Pengawasan II;
- h. Seksi Pengawasan III;
- i. Seksi Pengawasan IV;
- j. Seksi Pengawasan V; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Peran Strategis Instansi

Peran strategis yang dilakukan KPP Pratama Sumedang selaku instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak adalah program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara dengan menyelenggarakan pemeriksaan, penyuluhan dan penetapan penagihan pajak.

C. Sistematika Pelaporan

Penyusunan laporan berpedoman pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini akan disajikan intisari laporan mengulas tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang beserta hasil capaiannya, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta langkahlangkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mengatasi kendala yang mungkin akan timbul pada periode berikutnya.

3. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan hal-hal yang bersifat gambaran umum tentang KPP Pratama Sumedang, yang meliputi tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis instansi yang bersangkutan, serta sistematika pelaporan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi gambaran singkat tentang rencana strategik dan rencana kinerja KPP Pratama Sumedang yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program KPP disertai indikator keberhasilan pencapaiannya.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan diuraikan secara rinci hasil evaluasi kegiatan, pencapaian sasaran, dan akuntabilitas keuangan KPP Pratama Sumedang tahun 2024 disertai analisisnya.

6. Bab IV Penutup

Lampiran:

- Formulir Pengukuran Kinerja
- Capaian IKU

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

I. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

II. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- 1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia:
- meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

III. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan oleh karena itu tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang adalah:

- 1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Menghimpun Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang;
- Memperbaharui diri secara terus menerus guna mengantisipasi perubahan lingkungan serta perkembangan teknokrasi dan administrasi perpajakan yang mutakhir.

IV. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Adapun sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yaitu "Tercapainya target penerimaan pajak sesuai rencana yang telah ditetapkan."

V. Kebijakan dan Program Instansi

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang merumuskan beberapa kebijakan yang akan dilakukan disertai dengan program-program pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan dilakukan terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- a. Peningkatan sarana
- b. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta pengelolaan keuangan
- c. Percepatan Penyelesaian Pelayanan

2. Pencapaian Rencana Penerimaan PPh

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

a. Intensifikasi PPh

- b. Ekstensifikasi PPh
- c. Penagihan PPh
- d. Pengawasan Administrasi PPh

3. Pencapaian Rencana Penerimaan PPN

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- a. Intensifikasi PPN
- b. Ekstensifikasi PPN
- c. Penagihan PPN
- d. Pengawasan Administrasi PPN

4. Pencapaian Rencana Penerimaan PBB

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- a. Intensifikasi PBB
- b. Ekstensifikasi PBB
- c. Penagihan PBB
- d. Pengawasan Administrasi PBB

5. Membangun Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak

Kebijakan ini diwujudkan melalui program:

- a. Peningkatan Penyuluhan
- b. Pengamatan Potensi Perpajakan

B. Perjanjian Kinerja

Target kinerja tahun 2024 yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang telah dicanangkan dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang tahun 2024.

Sasaran Strategis dapat bersifat *output/outcome* (sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai), bersifat proses (mengenai apa yang ingin dilakukan), dan bersifat *input* (mengenai apa yang seharusnya kita miliki).

Sedangkan Indikator Kinerja adalah merupakan ukuran kuantitatif (dapat juga kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan yang memenuhi kriteria SMART-C, yaitu:

- a. spesifik;
- b. terukur;

- c. dapat dicapai;
- d. sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi;
- e. memiliki batas waktu pencapaian;
- f. sesuai perkembangan strategi organisasi.

pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tusi DJP antara lain :

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax).

Untuk mengetahui pencapaian sasaran, perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Adapun realisasi dan target Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang pada tahun 2024 dapat dilihat dalam form Capaian IKU tahun 2024 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada perspektif stakeholder dan

perspektif kustomer (IKU-IKU Utama):

Kode	ode						Bobot	Indeks
SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Tertimbang	Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	98,76
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,76
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,14%	Ма	E/L	26,00%	57,78%	101,14
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak	100.00	05.50	Mo	D/I	10.009/	42.220/	05.50
10-CF	bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,50	Ma x	P/L	19,00%	42,22%	95,50
	Customer Perspective						20,00%	102,87
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,70
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan	100,00%	101,15%	Ma	E/L	26,00%	57,78%	101,15
2a-01	Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,0070	101,1370	X	L/L	20,0076	37,7070	101,15
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan	100,00%	109,58%	Ma	P/L	19,00%	42,22%	109,58
25 01	penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak	100,0070	103,3070	X	. / _	13,0070	72,2270	103,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,03
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan	100,00%	101,03%	Ма	E/M	21,00%	100,00%	101,03
oa 0.	Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,0070	101,0070	X		21,0070	100,0070	101,00
	Internal Process Perspective						25,00%	116,32
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,87
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas	74,00%	88,80%	Ма	E/M	21,00%	50,00%	120,00
10 01	kegiatan edukasi dan penyuluhan	1 1,0070	00,0070	X		21,0070	00,0070	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,73%	Ма	E/M	21,00%	50,00%	109,73
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Ма	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,89
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan	100,00%	120,00%	Ма	P/M	14,00%	33,33%	120,00
	atas data dan/atau keterangan	100,0070	.20,0070	X	. ,	. 1,0070	00,0070	.20,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,60%	Ма	P/M	14,00%	33,33%	119,60
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP	100,00%	117,09%	Ma x	P/M	14,00%	33,33%	117,09
7	Penegakan hukum yang efektif							112,06
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,63%	Ma	P/M	14,00%	26,92%	117,63
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	104,75%	Ma	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti	100,00%	100,00%	Ma	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas	,	,			,	,	115,76
	Persentase penyelesaian laporan							
8a-CP	pengamatan dan penyediaan data potensi	100,00%	110,00%	Ma x	P/M	14,00%	42,42%	110,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	97,00%	Ma	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,48
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,95
0 11	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan	400.00	447.05		D/14	44.000/	00.000/	447.05
9a-N	kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,05	Ma x	P/M	14,00%	33,33%	117,05
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,53	Ma	P/M	14,00%	33,33%	112,38
0 - N	Indeks efektivitas implementasi manajemen			N4-	D/14	44.0007		
9c-N	kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,50	Ma x	P/M	14,00%	33,33%	109,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Ma	P/M	14,00%	100,00%	120,00
		ilai						108,40

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis (SS) 1 (Stakeholder Perspective):

Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Yang Optimal

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

Capaian IKU 1a-CP Presentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	Rp 450.023.439.000,00	Rp 635.405.132.160,00	120,00%
2023	Rp 482.998.897.000,00	Rp 502.704.953.094,00	104,08%
2024	Rp 543.648.999.000,00	Rp 549.863.129.972,00	101,14%



Grafik IKU 1a-CP Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

Dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan indeks capaian 101,14%. Tantangan yang dihadapi dalam upaya mencaai realisasi penerimaan pajak tahun 2024 yaitu antara lain :

- 1. Shortfall penerimaan dari berbagai proyek pembangunan pemerintah (Pembangunan jalan tol cisumdawu dan bendungan jatigede) telah rampung.
- Penambahan Wajib Pajak baru belum terlalu signifikan dalam menambah penerimaan pajak.

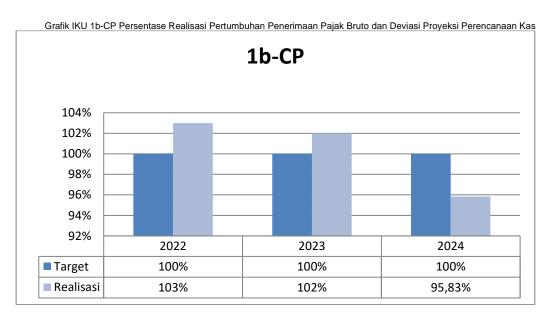
Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak diantaranya melalui melaksanakan pengawasan rutin dan melakukan komunikasi dengan WP Penentu Penerimaan yang mengalami penurunan setoran melalui media komunikasi, Melakukan pengujian kepatuhan WP melalui pemeriksaan yang berkualitas, khususunya wajib pajak penentu penerimaan, dan Melakukan tindakan penagihan yang efektif.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1b-CP:

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.

Capaian IKU 1b-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

		,,	,
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	100	103	103,00
2023	100	102	102,00
2024	100	95,83	95,83



Secara nasional, penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang di tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 88,79% dan secara historis, mengalami pertumbuhan -7,78% dengan pertumbuhan penerimaan secara keseluruhan sebesar 92,22% namun indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas mencapai 90% dari target, sehingga dengan jumlah capaian IKU sebesar 95,83% di tahun 2024. Penurunan pertumbuhan bruto tahun 2024 disebabkan karena terdapat *Shortfall* penerimaan dari berbagai proyek pembangunan pemerintah (Pembangunan jalan tol cisumdawu dan bendungan

jatigede) telah rampung dan Penambahan Wajib Pajak baru belum terlalu signifikan dalam menambah penerimaan pajak tahun 2024.

2. Sasaran Strategis (SS) 2 (Customer Perspective):

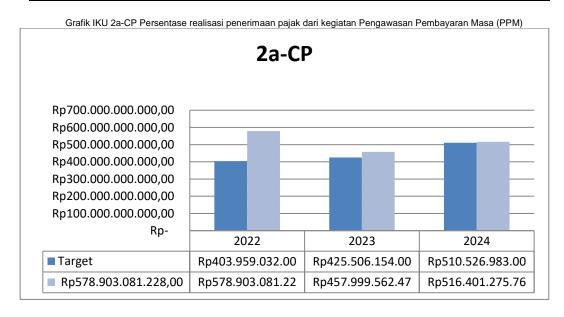
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP:

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Capaian IKU 2a-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	Rp 403.959.032.000,00	Rp 578.903.081.228,00	120,00%
2023	Rp 425.506.154.000,00	Rp 457.999.562.472,00	107,64%
2024	Rp 510.526.983.000,00	Rp 516.401.275.765,00	101,15%



Dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2024 realisasi Persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan indeks capaian 101,15. Sebagai bahan evaluasi terhadap capaian tersebut, KPP Pratama Sumedang akan terus berupaya mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak diantaranya yaitu:

- Meningkatkan pengawasan pembayaran rutin terhadap WP, utamanya
 WP penentu penerimaan
- 2. Monitoring revisi DIPA,APBN dan APBD dan realisasinya terhadap bendahara-bendahara yang besar (Dinas Pendidikan, PUPR, dll)
- 3. Monitoring Bendahara Desa
- Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi untuk menambah basis wajib pajak

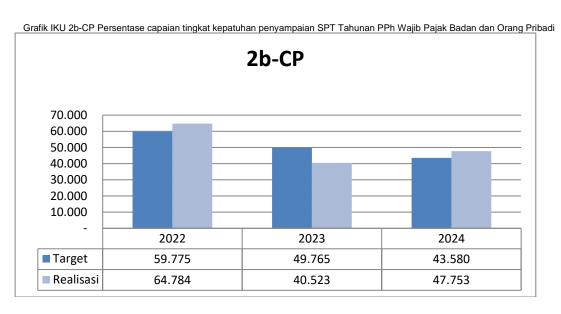
hal-hal tersebut telah dilakukan secara konsisten dalam 3 tahun terakhir, dan merupakan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai yang terlibat untuk memaksimalkan kinerja guna mendukung tercapainya penerimaan pajak secara optimal bagi KPP Pratama Sumedang.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-CP:

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Capaian IKU 2b-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	59.775	64.784	108,38%
2023	49.765	40.523	81,43%
2024	43.580	47.753	109,58%



Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 di lingkungan KPP Pratama Sumedang adalah 109,58%. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang selaku Kantor Modern

selalu berupaya seoptimal mungkin dalam upaya meningkatkan kepatuhan formal perpajakan Wajib Pajak diantaranya melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada para pemberi kerja yang memiliki banyak karyawan, serta dinas dinas pemerintahan, melaksanakan kegiatan Kuldesak (Kunjungan langsung Desa, Satuan Kerja, dan Pemberi Kerja), penyampaian surat himbauan penyampaian SPT Tahunan dan melalui *Whatsapp blast*, kegiatan Hubungi Untuk Ingatkan (HUI 446) kepada Wajib Pajak terkait hak dan kewajiban perpajakannya.

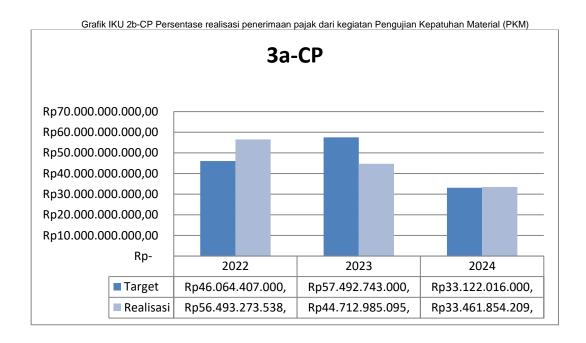
3. Sasaran Strategis (SS) 3 (Customer Perspective):

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-CP:
 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Capaian IKU 3a-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	Rp 46.064.407.000,00	Rp 56.493.273.538,00	120,00%
2023	Rp 57.492.743.000,00	Rp 44.712.985.095,00	77,77%
2024	Rp 33.122.016.000,00	Rp 33.461.854.209,00	101,03%



Pada tahun 2024, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan indeks capaian 101,03%. IKU tersebut tidak dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dikarenakan:

Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak diantaranya melakukan analisis penggalian potensi yang lebih komprehensif, menerbitkan SP2DK dan menyelesaikan LHP2DK atas SP2DK tersebut, melakukan pengawasan yang lebih intensif dan komperhensif terhadap Wajib Pajak yang masuk ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan, menindaklanjuti data WP Outstanding yang masih berkualitas,

informasi, serta melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak. KPP Pratama Sumedang akan terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

4. Sasaran Strategis (SS) 4 (Internal ProcessPerspective):

Edukasi dan pelayanan yang efektif

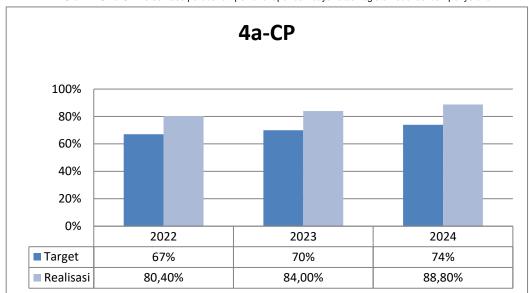
a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP:

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Capaian IKU 3a-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	67%	80,40%	120,00%
2023	70%	84,00%	120,00%
2024	74%	88,80%	120,00%

Grafik IKU 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan



Pada tahun 2024 capaian kinerja 4a-CP terkait Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mendapat capaian 120%. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan edukasi dan penyuluhan, dilakukan dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan profil wajib pajak oleh asisten penyuluh, serta konsisten melakukan edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak baik secara langsung dengan tatap muka maupun melalui platform media sosial dengan melakukan *live streaming* penyuluhan melaui media sosial.

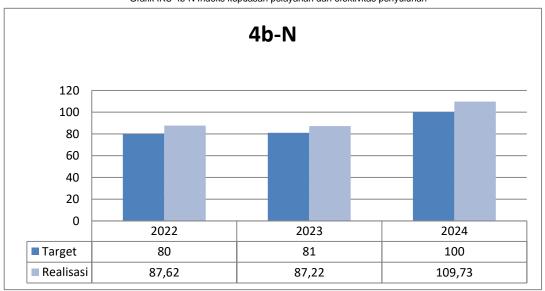
b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N:

Indeks Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Capaian IKU 4b-N pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	80	87,62	109,53%
2023	81	87,22	107,68%
2024	100	109,73	109,73%

Grafik IKU 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan



Capaian IKU 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 mencapai 109,73%. Dalam tiga tahun terakhir capaian IKU ini selalu mencapai target yang ditetapkan. Hal yang dilakukan dalam mencapai IKU ini yaitu:

- 1. Komitmen pimpinan serta seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak;
- 2. Berusaha memberikan pelayanan optimal sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;
- 3. bersikap ramah terhadap wajib pajak;
- 4. Menjungjung tinggi Integritas serta kode etik dan kode perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan baik secara tatap muka, daring, maupun melalui saluran lainnya; dan
- 5. Melakukan survei kepuasan layanan secara berkala setiap bulan, untuk selalu menjaga standar pelayanan yang tinggi demi kepuasan pelayanan kepada wajib pajak.

Pengawasan pembayaran masa yang efektif

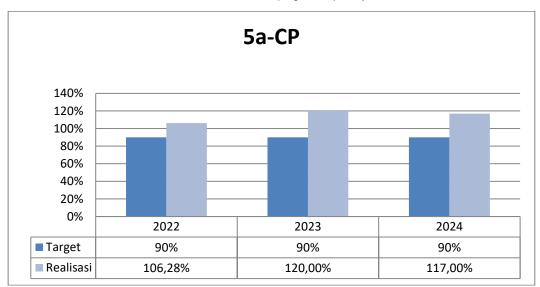
a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP:

Persentase pengawasan pembayaran masa

Capaian IKU 5a-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	90%	106,28%	118,09%
2023	90%	120,00%	120,00%
2024	90%	117,00%	120,00%

Grafik IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa



Capaian IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 mencapai 120% dari target. Dalam tiga tahun terakhir capaian IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa selalu mencapai target yan ditetapkan, hal ini dikarenakan upaya-upaya yang optimal yang dilakukan, yaitu :

- 1. Menerbitan STP sesuai dafnom STP dengan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- 2. Pemanfaatan data perpajakan pada aplikasi Approweb secara optimal berdasarkan target dan bahan baku data yang tersedia;
- Aktif berkomunikasi dengan wajib pajak yang belum atau kurang setor pembayaran pajak masa;
- 4. Meningkatkan pengawasan atas pembayaran masa secara komprehensif.

hal-hal tersebut telah dilakukan secara konsisten dalam 3 tahun terakhir, dan merupakan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai yang terlibat untuk memaksimalkan kinerja guna mendukung tercapainya penerimaan pajak secara optimal bagi KPP Pratama Sumedang.

Pengujian kepatuhan material yang efektif

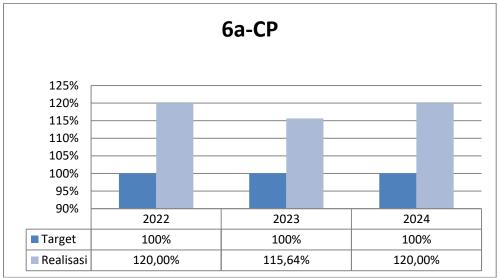
a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP:

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Capaian IKU 6a-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	100%	120,00%	120,00%
2023	100%	115,64%	115,64%
2024	100%	120,00%	120,00%

Grafik IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan



Capaian IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selama tiga tahun mencapai target yang ditetapkan, rencana aksi yang telah dilakukan yaitu:

- 1. Menindaklanjuti SP2DK yang belum ada pembayaran dengan menghubungi WP lebih intensif;
- 2. Menyelesaikan semua data yang ada potensinya di approweb;
- 3. Melaksakan Visit dan KPDL kepada Wajib Pajak.

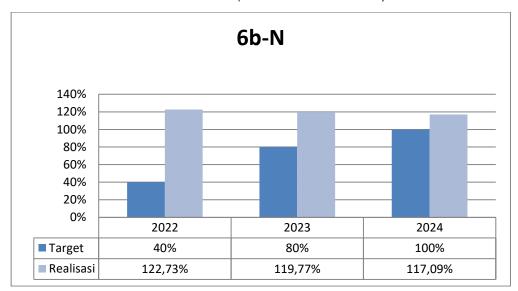
Hal-hal tersebut telah dilaksakan secara konsisten, sehingga memberikan hasil melebihi target yang ditetapkan.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Capaian IKU 6b-N pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	100%	122,73%	120,00%
2023	100%	119,77%	119,77%
2024	100%	117,09%	117,09%

Grafik IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan



Capaian IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dalam tiga tahun terakhir mencapai hasil yang memuaskan (mencapai dan melampaui target yang ditetapkan) rencana aksi yang telah dilakukan secara konsisten selama tiga tahun yaitu :

- 1. Penerbitan STP sesuai dafnom STP selain tahun berjalan secara optimal
- 2. Pengawasan Penerbitan STP dan pembayarannya
- 3. Analisis data matching untuk keperluan DPP

Sehingga pencapaian target IKU 6b-N tersebut dapat tercapai dengan optimal dan mendukung penerimaan pajak KPP Pratama Sumedang.

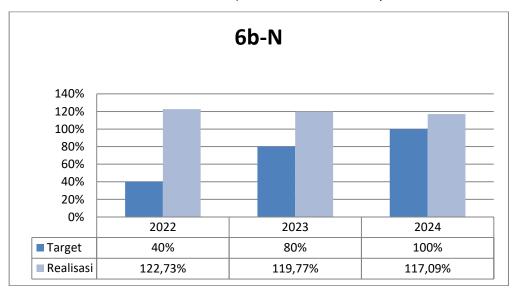
c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Capaian IKU 6c-N pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022			
2023			
2024	100,00	112,49	112,49%

Realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Sumedang tepat waktu untuk tahun 2024 telah melampaui target, komponen penilaian dari IKU ini terdiri dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak (bobot 30%), Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%).

Grafik IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan



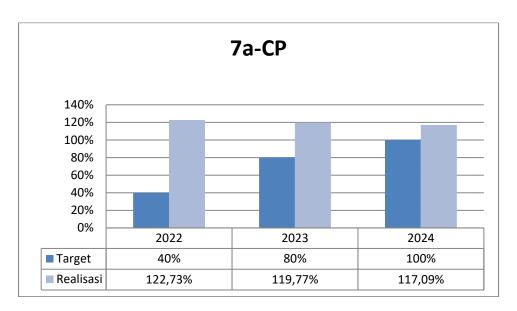
Penegakan hukum yang efektif

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-CP :
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Capaian IKU 7a-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	40,00%	122,73%	120,00%
2023	80,00%	119,77%	120,00%
2024	100,00%	116,63%	116,63%

Grafik IKU 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian



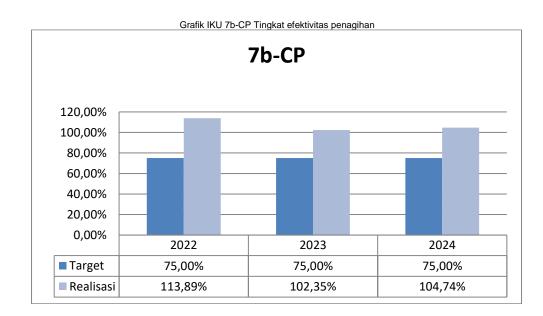
Capaian IKU 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dalam tiga tahun terakhir selalu mencapai dan melebihi target yang ditetapkan. Upaya upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut yaitu :

- 1. Mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan
- 2. Mengoptimalkan pengujian melalui pemeriksaan yang berkualitas
- 3. Mengoptimalkan pemeriksaan melalui kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang didapatkan

e. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-CP : Tingkat efektivitas penagihan

Capaian IKU 7b-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	75,00%	113,89%	120,00%
2023	75,00%	102,35%	120,00%
2024	75,00%	104,74%	120,00%



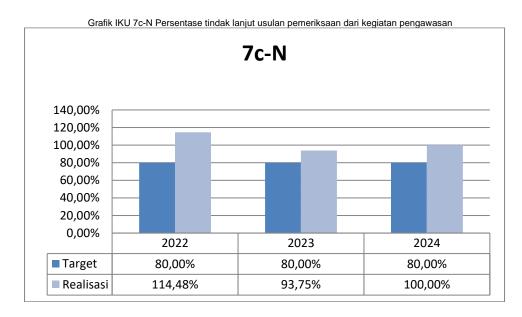
Capaian IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan dalam tiga tahun terakhir selalu mencapai dan melebihi target yang ditetapkan. Upaya upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut yaitu :

- Melakukan Tindakan Penagihan Aktif berupa Penyampaian Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran Rekening, dan Pencegahan Penunggak Pajak ke Luar Negeri
- 2. Optimalisasi tindakan penagihan atas wajib pajak DSPC
- 3. Update tindakan penagihan atas 100 Wajib Pajak Penunggak Pajak Terbesar.

f. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7c-N Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan

Capaian IKU 7c-N pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	80,00%	114,48%	120,00%
2023	80,00%	93,75%	117,19%
2024	80,00%	100,00%	120,00%



Capaian IKU 7c-N Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dalam tiga tahun terakhir selalu mencapai dan melebihi target yang ditetapkan. Upaya upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut yaitu :

- 1. Melakukan pembahasan atas usulan pemeriksaan oleh komite kepatuhan setiap bulan secara intensif dan berkala.
- 2. Selalu mengupayakan usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan di dihasilkan berkualitas atau sesuai kriteria yang telah ditetapkan

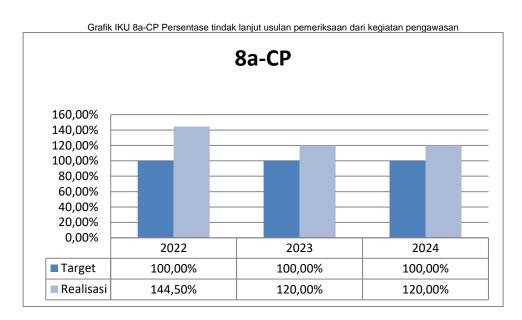
Data dan informasi yang berkualitas

g. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8a-CP

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Capaian IKU 8a-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	100,00%	144,50%	120,00%
2023	100,00%	120,00%	120,00%
2024	100,00%	120,00%	120,00%



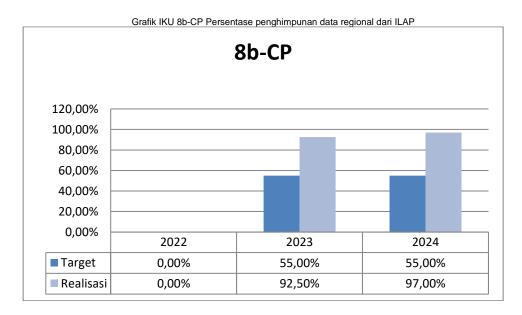
Capaian IKU 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dalam tiga tahun terakhir selalu mencapai dan melebihi target yang ditetapkan. Upaya upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut yaitu :

- Melaksanakan kegiatan lapangan (KPDL) dan penyisiran berbasis wilayah yang lebih intensif, serta memaksimalkan penggunaan IT
- 2. Pencarian data WP melalui berbagai sumber lain misal google maps dll

h. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Capaian IKU 8b-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	55,00%	92,50%	168,18%
2024	55,00%	97,00%	176,36%



Capaian IKU 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan. Upaya upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut yaitu :

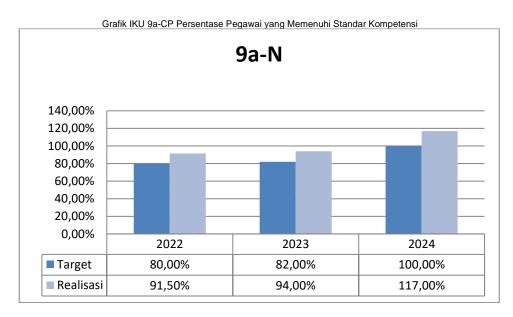
- 1. Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait data data yang diminta;
- 2. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah kabupaten sumedang

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indikator Kinerja Utama (IKU) 9a-N
 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

Capaian IKU 9a-N pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	80,00%	91,50%	114,38%
2023	82,00%	94,00%	114,63%
2024	100,00%	117,00%	117,00%



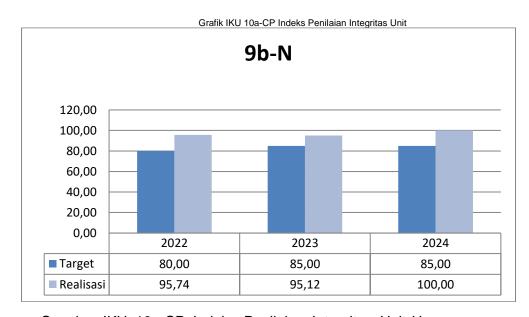
Capaian IKU 9a-N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi dalam tiga tahun terakhir mencapai target yang ditetapkan. Berbagai upaya yang dilaksanakan yaitu :

- 1. Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai setiap semester
- 2. Pelaksanaan IHT tentang Ketentuan Perpajakan, Komunikasi, dll untuk mendukung kompetensi pegawai
- 3. Seruan untuk menyelesaikan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada KLC

j. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Capaian IKU 9b-N pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	80,00	95,74	119,68%
2023	85,00	95,12	111,91%
2024	85,00	100,00	117,65%



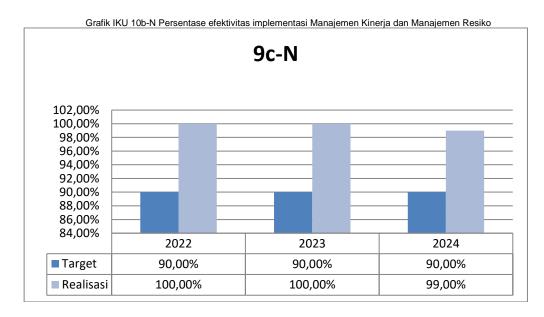
Capaian IKU 10a-CP Indeks Penilaian Integritas Unit Upaya upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut yaitu :

- 1. Komitmen Pimpinan dan Seluruh Pegawai untuk selalu menjaga Integritas serta Kode Etik dan Kode Perilaku.
- 2. Pelaksanaan ICV dan IHT secara berkala dalam meningkatkan dan mengigatkan terkait integritas dan KEKP.
- 3. Pelaksanaan survei kepada sampling wajib pajak, terkait kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

j. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9c-N
 Persentase efektivitas implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Capaian IKU 9c-N pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	90,00%	100,00%	111,11%
2023	90,00%	100,00%	111,11%
2024	90,00%	99,00%	110,00%



Capaian IKU 9c-N Persentase efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dalam tiga tahun terakhir mencapai target yang ditetapkan. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut yaitu sebagai berikut :

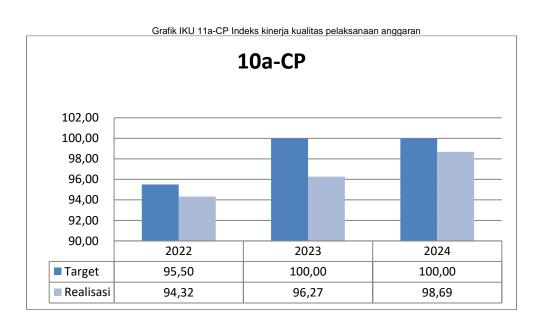
- 1. Pelaksanaan rapat rutin DKO dan Manajemen Resiko tepat waktu;
- 2. Permintaan data-data kelengkapan DKO lebih awal;
- Penyusunan permasalahan mitigasi resiko di masing-masing seksi terkait, dan upaya mitigasi dan rencana aksi yang melibatkan semua kepala seksi, agar mencapai solusi yang diharapkan.
- 4. Administrasi terkait DKO dan Manajemen Risiko yang baik

Penguatan pengelolaan keuangan yang Akuntabel

k. Indikator Kinerja Utama (IKU) 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Capaian IKU 10a-CP pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	95,50	94,32	98,76%
2023	100,00	96,27	96,27%
2024	100,00	98,69	98,69%



Capaian IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, dalam dalam tiga tahun terakhir tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Kendala-kendala utama yaitu :

- 1. Terdapat Belanja modal yang belum terserap secara optimal
- 2. Perubahan kebijakan dan formula yang sering berubah terkait perhitungan IKPA sehingga sulit untuk di prediksi dari awal tahun
- 3. Optimalisasi penyerapan anggaran, Efisiensi Anggaran, dan Kebutuhan Anggaran yang sulit untuk mencapai titik keseimbangan, agar mendapat Indeks Kinerja IKPA yang baik

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1. Rapat koordinasi tim Keuangan secara berkala, untuk monitoring dan evaluasi anggaran kinerja anggaran;
- 2. Meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam membuat SPM, LPJ, dan indikator-indikator lain yang memperngaruhi penilaian IKPA

Upaya-upaya tersebut telah diupayakan dengan optimal optimal dan konsisten sepanjang tahun, namun masih belum menghasilkan output yang sesuai target yang ditetapkan.

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

Jumlah dana yang dialokasikan untuk suatu program kegiatan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu rencana kerja, semakin besarnya dana yang tersedia, semakin efektif terhadap suatu pencapaian kinerja.

Realisasi anggaran KPP Pratama Sumedang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja		Pegawai	Barang	Modal
DID 4 D 4 0 4 5	Pagu anggaran	706.578.000	11.271.255.000	29.560.000.000
DIPA BA-015 KPP Pratama	Realisasi	653.382.000	10.417.846.069	25.868.191.393
Sumedang				
	% Penyerapan	92,47%	92,43%	87,51%

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang merupakan laporan yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang telah berupaya merealisasikan target sesuai dengan 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Tahun 2024, dari target yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jawa Barat I sebesar Rp 543.648.999.000 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang mencapai penerimaan sebesar Rp. 549.863.129.972 atau 101,14%.

Dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak, banyak permasalahan dan kendala-kendala terkait kinerja yang dihadapi selama satu tahun berjalan terutama kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang telah berusaha semaksimal mungkin dengan menyadarkan masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak berdasarkan skala prioritas yang mempunyai deterent effect luas terhadap masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi acuan bagi segenap jajaran di unit kerja kami dalam upaya meningkatkan kinerja di tahun 2024. Segala arahan dan masukan yang positif dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan terutama dari Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I.